

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja merupakan sendi utama dalam produksi, bekerja sebagai faktor produksi yang mempunyai arti sangat besar. karena seluruh kekayaan alam tidak akan berguna bila tidak diolah dan dikerjakan oleh manusia (buruh/pekerja). dengan bekerja seseorang akan menghasilkan barang dan jasa, dan dengan cara tersebut para pekerja akan mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. selain itu islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja dan berusaha diseluruh penjuru bumi guna mencari anugerah Allah sehingga Islam benar – benar menjadikan pekerjaan sebagai perimbangan hidupnya (Anafarhanah, 2017).

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. adapun dalam islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) (Zaroni, 2007).

Seperti yang terdapat dalam al-qur'an berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya” (Al-Mulk ayat 15)

Ayat tersebut menjelaskan tentang manusia yang harus mencari rezeki yang telah Allah berikan dan menikmatinya dengan cara bekerja atau berusaha dan tidak bermalas-malasan.

Pekerjaan merupakan sarana untuk mendapatkan rezeki dan penghidupan yang layak, dengan bekerja dengan baik maka seorang buruh/pekerja akan mendapat penghasilan yang sesuai, akan tetapi masalah yang sering muncul dalam dunia pekerjaan yaitu tidak dipenuhinya hak-hak pekerja tersebut. distributor adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bertanggungjawab untuk mendistribusikan atau menyalurkan produk perdagangan, baik itu barang maupun jasa, ke *retailer* atau konsumen akhir. Dalam hal ini, distributor hanya mengambil produk yang sudah jadi dan siap digunakan tanpa perlu memodifikasinya.¹

Sumber daya manusia merupakan asset yang paling berharga dalam perusahaan, tanpa manusia atau karyawan maka sumber daya dalam perusahaan tidak dapat diolah dengan baik, sehingga tidak menghasilkan laba bagi perusahaan, di dalam perusahaan sungguh tidak asing lagi untuk membuka lowongan pekerjaan, bahkan perusahaan sangatlah membutuhkan karyawan untuk menunjang produktivitas dan mungkin akan menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan. karyawan merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi perusahaan karena tanpa adanya karyawan tidak

¹ <https://www.jojonomic.com/blog/distributor/> (diunduh pada tanggal 03 Juli 2020 pada pukul 22.15 wib)

akan terjadinya produktivitas dalam perusahaan tersebut. maka oleh karena itu dari sekian banyak perusahaan bahkan bukan hal yang aneh lagi perusahaan itu sendiri membuat suatu tindakan untuk mencari karyawan dengan melakukan berbagai macam lowongan kerja, karena dengan ini perusahaan akan mendapatkan karyawan yang berbakat atau tidak.(Fajarianto et al., 2017). Salah satu interaksi muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah upah atau penggajian karyawan yang dalam hukum islam dikenal dengan istilah (*Ujrah*). Dalam fiqh *al-Ijarah* berarti transaksi kepemilikan atas manfaat barang atau harta dengan imbalan tertentu. Dalam islam, upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan al-ajr (penyewa) dan musta'jir(menyewakan). Dalam hal ini, pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan karyawan dianggap pihak yg menyewakan.

Dalam suatu hubungan pekerjaan harus ada perjanjian yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat oleh karyawan dan pengusaha secara perseorangan. Perjanjian kerja merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika seseorang karyawan berjanji kepada perusahaan untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja. Perjanjian dalam hukum islam merupakan salah satu macam *Ijarah*, yaitu *Ijarah 'amal'* (sewa menyewa tenaga manusia) dengan demikian dalam pelaksanaan perjanjian kerja masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

sama suka diantar kamu. Dan janganlah kamu mebunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS. An-nisa ayat 29)”²

Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi ”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”³

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di UD Hidayah terdapat masalah berkenaan dengan sistem pemberian upah , dalam hal ini, hanya sales kampas yang dilakukan pemotongan gaji dari kehilangan barang di toko tersebut. Pemotongan upah seharusnya melalui kesepakatan. Namun, UD Hidayah memotong upah kampas secara sepihak dari seharga kehilangan barang tersebut. Dalam hal ini upah diberikan oleh perusahaan kepada pekerja harus jelas dan bisa diketahui. Sehingga ada ketidakjelasan besaran upah yang diterima oleh pekerja setiap bulannya. Hal itu dikarenakan setiap dilakukan pembukuan harian atau mingguan terjadi minus antara catatan barang yang keluar dan uang yang masuk. Sales kampas sebagai salah satu penanggung jawab karena ia yang menerima uang dari pembeli. Sehingga ia harus mengganti kerugian akibat kelalaiannya dalam melakukan pekerjaan dan harus

² <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29> (diunduh tanggal 05 Juli 2020 pada pukul 20.19 wib)

³ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menerima bahwa setiap bulan upahnya dipotong akibat kehilangan barang yang terjadi. Hal ini sangat memprihatikan seharusnya pemberian gaji kepada karyawan harus secara jelas dan adil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam judul ***“PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN TERKAIT BARANG HILANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi kasus di UD Hidayah)”***

B. Rumusan Masalah

Upah yang diberikan oleh karyawan harus sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini UD Hidayah tidak memberikan upah yang sesuai karena adanya pemotongan upah pada karyawan yang menghilangkan barang dan pemotongan tersebut tidak dijanjikan pada awal akad kerjasama. Maka dari itu penulis merumuskan beberapa masalah dibawah ini :

1. Bagaimana mekanisme pemotongan upah terhadap pekerja di UD Hidayah?
2. Bagaimana pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas barang hilang perspektif hukum Ekonomi Syariah di UD Hidayah ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pokok permasalahan, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan upah terhadap pekerja di UD hidayah

2. Untuk mengetahui bagaimana pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas barang hilang perspektif Hukum Ekonomi Syariah di UD Hidayah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi penulis: sebagai sarana penambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana proses pemotongan upah terhadap pekerja di UD Hidayah
- b. Bagi UD Hidayah: sebagai sarana penambah informasi mengenai pemotongan upah terhadap pekerja berdasarkan perspektif hukum islam
- c. Bagi akademis : sebagai sumber informasi dan sarana pemikiran bagi kalangan pembaca dalam menunjang penelitian isinya.

E. Studi Terdahulu

Pada tahun 2018 dilakukan penelitian oleh Neneng Rita Fatmawati, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang membahas tentang “Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Perspektif Islam dan PP No.78 tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi di Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari Kab. Pandeglang) dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa neneng memfokuskan mengenai denda pemotongan upah yang di akibatkan oleh barang yang hilang dalam PP no.78 tahun 2015. Persamaan masalah yang terjadi membahas mengenai denda pemotongan upah akibat barang hilang.

Pada tahun 2019 dilakukan penelitian oleh Luthfatul Arifiyah , Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membahas tentang “Pemotongan Upah Karyawan Seabagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)” dalam skripsi ini disimpulkan bahwa karyawan harus mengganti barang yang hilang dan pemotongan upah tersebut dikenakan oleh seluruh karyawan. Persamaan masalah yang terjadi mengenai denda pemotongan gaji karyawan.

Pada tahun 2019 dilakukan penelitian oleh Alvian Akbar, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo” dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Crew akan menggantikan jika ada kerusakan fisik seperti kaca dan denda pemotongan selama 5 kali jalan pp. persamaan masalah yang terjadi mengenai pemotongan denda gaji karyawan yang dilakukan perusahaan.

Tabel perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Neneng Ria Fatmawati	Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Perspektif Islam dan PP No.78 tahun 2015 Tentang	Persamaan permasalahan yang terjadi mengenai	Perbedaannya pada penelitian ini yaitu pada

		Pengupahan (Studi di Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)	denda pemotongan	objek penelitiannya dan perspektifnya
2.	Luthfatul Arifiyah	Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)	Persamaan permasalahan yang terjadi mengenai denda pemotongan	Perbedaannya pada penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya dan perspektifnya
3.	Alvian Akbar	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo	Persamaan permasalahan yang terjadi mengenai denda pemotongan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti

F. Kerangka Berfikir

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum dan sebagainya. awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. akan tetapi setelah terjadi konflik di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman). Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. pembahasan muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi, semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang haram dan kesepakatan untuk membunuh seseorang (Sitepu, 2017).

Perjanjian merupakan peristiwa konkret berupa kesepakatan untuk menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sedangkan menurut hukum islam, para ulama fiqh ketika berbicara tentang hukum perjanjian yang lazimnya mereka menggunakan istilah akad, yang secara harfiah berarti ikatan atau janji. dalam terminologi hukum *akad* (perjanjian) adalah bertemunya *kabul* (penerima) dengan *ijab* (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya sahnyanya suatu perjanjian menurut hukum islam haruslah terpenuhi rukun dan syarat perjanjian (*akad*). Apabila syarat ini tidak terpenuhi akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk (batal). (Huda, n.d.)

Ijarah secara etimologis adalah imbalan atau perbuatan, atau secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *Ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja. Menurut jumhur ulama bahwa rukun akad *Ijarah* adalah; 1) Dua pihak yang berakad; 2) Pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan); 3) *Ujrah*; dan 4) Manfaat.⁴

Upah berasal dari kata “*Al-ajru*” yang berarti “*Al-Iwadhu*” (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur *Ijarah*. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*), dan manfaat. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya. *Ihsan* dalam kepustakaan Islam berarti “membaikkan, memperbaiki, berbuat baik, berbuat kebajikan”. Penghayatan akan hadirnya Allah SWT dalam hidup melalui penghayatan terhadap diri sendiri, seakan akan diri merasa berada di hadirat Allah.

Upah dalam Islam ditentukan melalui negosiasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan upah besaran upah menurut syaria^h adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak. Adapun perintah adil termasuk dalam penggajian atau pengupahan dapat dilihat dalam

⁴ Jaih Mubarak, dan Hassanudin, *fikih muamalah maliyah, akad ijarah dan jualah*, cetakan pertama, (Bandung : simbiosis rekayasa media, 2017) hlm.12

Surat An-Nahl

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:90).⁵

Pemberian upah (al-*Ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam hadis juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا

⁵ <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90> (diunduh pada tanggal 15 mei 2021 pada pukul 20.10 wib)

خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصْمَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤِفِّهِ أَجْرَهُ. (رواه
ابن ماجه و أحمد

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seseorang yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak membayar upahnya" (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

Yang berarti mereka harus memberikan hak untuk pekerja berupa upah yang harus dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja, dan tidak memberikan upah yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan karena setetes keringat yang diberikan pekerja kepada perusahaan harus dibayar dengan upah yang sesuai dan tidak merugikan kedua belah pihak, dimana adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sangatlah penting untuk melaksanakan akad tersebut agar tidak terjadinya kecacatan pada akad yang dijalani oleh kedua belah pihak tersebut. Karena Allah sangat membenci perbuatan yang merugikan atau mengkhianati orang lain dengan tidak menepatkan janji ayang ia berikan kepada pihak yang telah berakad dengannya.

Adapun perjanjian dalam melakukan suatu akad sebaiknya melalui kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, tidak memberatkan salah satu pihak sehingga tidak terjadinya akad yang cacat akibat keterpaksaan dalam melakukan transaksi tersebut, adapun fiqih muamalah yang menjelaskan tentang keridhaan kedua belah pihak dalam menjalankan akad, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَايُ الْمُتَعَاذِلَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِلْتَزَمَاهُ بِاتِّعَاذٍ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan” (al Nadwi, 1998: 253).

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

G. Langkah- langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang

diinginkan adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dalam penelitian ini.⁶

2. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian lapangan yang berlokasi di UD Hidayah yang beralamat Jalan. Lintas Tugu Liwa, Kecamatan. Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Penelitian ini akan berlangsung sejak bulan September s.d selesai.

3. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan bukan berupa angka mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data yang berkaitan dengan mekanisme pemotongan upah denda di UD hidayah
- 2) Data yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan upah akibat barang hilang di UD Hidayah. Data ini penulis dapatkan dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara secara langsung dengan karyawan UD Hidayah.

4. Sumber Data

⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penelitian.⁷ Maka dalam penelitian ini ditemukan data primer dan data sekunder.

- 1) Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari karyawan UD Hidayah.
- 2) Sumber Data Sekunder merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.⁸ Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan UD Hidayah yang dilakukan pemotongan upahnya oleh perusahaan.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Literatur ini berupa buku, internet,

⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm. 12.

⁸ Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

3) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang ada.⁹

1. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari karyawan dan owner UD Hidayah, serta sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta , 1986), hlm. 231.